

Analisis Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten

¹Deris Desmawan, ²Adinda Kanza Salsabila, ³Lia Amalia, ⁴Raffy Amantha Anargya, ⁵Rahma Sasi Kirana, ⁶Valentina

¹Ilmu Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, derisdesmawan@untirta.ac.id

²Ilmu Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 5553220029@untirta.ac.id

³Ilmu Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 5553220041@untirta.ac.id

⁴Ilmu Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 5553220048@untirta.ac.id

⁵Ilmu Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 5553220033@untirta.ac.id

⁶Ilmu Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 5553220044@untirta.ac.id

Abstract:

The influence of labor force participation rates and minimum wages on poverty in Banten province is an issue of concern to many parties. According to data from the Central Statistics Agency (BPS), in 2019 the poverty rate in Banten Province reached 8.19%, or around 1.5 million residents. This figure is higher than the national average of 9.22%. One factor that is considered very influential in overcoming poverty is the availability of employment. Productive and quality Labor Force Participation Rate (TPAK) can increase people's income and reduce poverty. The purpose of this study was to see the effect of the Labor Force Participation Rate and Banten Provincial Minimum Wage on Poverty. Panel data analysis was performed to prove the hypothesis using the ordinary least square method. The results showed that the Provincial Minimum Wage variable had a negative and insignificant effect on the number of poor people, while the labor force participation rate had a significant and positive effect on poverty in Banten Province.

Keywords: Poverty, Minimum Wage, Labor Participation, Banten Province.

Pendahuluan

Beberapa pihak mengkhawatirkan dampak upah minimum dan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap kemiskinan di Provinsi Banten. Jumlah penduduk Provinsi Banten yang terdapat di wilayah barat kepulauan Jawa cukup besar dan beragam. Banten, salah satu provinsi Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi tercepat, harus mengatasi sejumlah kendala untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonominya. Kemiskinan yang parah di daerah tersebut merupakan salah satu masalah yang harus diselesaikan. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan angka kemiskinan Provinsi Banten mencapai 8,19% atau hampir 1,5 juta jiwa terjadi pada tahun 2019. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 9,22%. Di Propinsi Banten, kemiskinan merupakan persoalan yang tidak hanya dipengaruhi oleh uang tetapi juga oleh standar dan kesiapan sarana prasarana, kesehatan, dan pendidikan yang layak. Angka kemiskinan di Provinsi Banten telah berkurang dalam beberapa tahun terakhir berkat upaya dari pemerintah dan pihak lain. Ketersediaan lapangan kerja merupakan salah

satu aspek yang diduga memiliki dampak signifikan dalam penanggulangan kemiskinan. TPAK yang produktif dan berkualitas dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Ciri-ciri kemiskinan yang tercantum dalam (Desmawan et al., 2022) antara lain masih berpenghasilan rendah atau bahkan tidak berpenghasilan, tidak memiliki pendidikan yang ideal, memiliki pekerjaan yang stabil, dan tidak memenuhi standar gizi dasar.

Undang-undang upah minimum juga dianggap penting dalam memerangi kemiskinan, terutama dalam menjaga kesejahteraan pekerja dan meminimalkan eksploitasi tenaga kerja oleh pemberi kerja. Upah minimum berfungsi sebagai pelindung hak-hak pekerja untuk mendapatkan kompensasi yang adil dan memadai terhadap pemberi kerja yang dapat memanfaatkannya dengan memberikan gaji yang sangat rendah. Selain mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas kerja, upah minimum yang adil juga dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi serta meningkatkan akses masyarakat terhadap standar hidup yang lebih baik dan lebih adil. Di Provinsi Banten, kebijakan ekonomi dan sosial harus mengutamakan gaji minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian bagaimana upah minimum dan partisipasi angkatan kerja mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Banten. Penelitian ini diyakini akan membantu memperdalam pemahaman kita tentang penyebab kemiskinan di daerah tersebut dan menawarkan strategi praktis untuk mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini diyakini akan memberikan hasil yang akan membantu pembuat kebijakan publik membuat strategi yang lebih berhasil dalam mengentaskan kemiskinan di Provinsi Banten.

Penelitian ini akan mengkaji dampak upah minimum dan partisipasi angkatan kerja terhadap kemiskinan di Provinsi Banten dengan menggunakan data dari tahun 2017 hingga 2022. Analisis regresi, salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menguji hubungan antara variabel dependen dan variabel independen, adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan merupakan variabel terikat dalam analisis regresi, sedangkan upah minimum Provinsi Banten dan jumlah partisipasi angkatan kerja merupakan variabel bebas. Diharapkan dengan menggunakan teknik analisis regresi ini akan dihasilkan data yang tepat dan tidak memihak tentang hubungan antara variabel-variabel tersebut. Selain itu, penelitian ini diyakini dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang dampak upah minimum dan partisipasi angkatan kerja terhadap kemiskinan di Provinsi Banten dalam jangka waktu yang panjang dengan menganalisis data dari tahun 2017 hingga 2022.

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih baik dan lebih tepat mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi penanggulangan kemiskinan di Provinsi Banten. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran seberapa besar partisipasi angkatan kerja dan upah minimum mempengaruhi tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Selain itu, studi ini diharapkan dapat menentukan apakah terdapat korelasi yang kuat antara faktor-faktor tersebut dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Banten.

Temuan penelitian ini juga dapat menjadi landasan bagi kebijakan publik yang lebih baik yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di daerah. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut, diharapkan kebijakan publik yang dihasilkan dari penelitian ini juga akan sangat membantu dalam penyelesaian masalah kemiskinan yang ada di Provinsi Banten. Tingkat partisipasi angkatan kerja dan upah minimum, dua isu utama dalam memerangi kemiskinan,

merupakan dua faktor yang dapat berdampak pada kemiskinan. Bahkan tenaga kerja yang besar dengan upah minimum yang tinggi tidak dapat memastikan pengentasan kemiskinan, terutama jika hanya ada sedikit pilihan pekerjaan yang tersedia. Namun, upah minimum yang rendah juga dapat memperburuk kondisi kerja dan memaksa orang untuk hidup di bawah garis kemiskinan, bahkan ketika ada kumpulan tenaga kerja yang cukup besar. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lengkap untuk menangani masalah tersebut, yang mencakup pelatihan kerja, produksi yang lebih besar, dan pembayaran gaji yang adil. Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini berupaya untuk mengetahui bagaimana pengaruh upah minimum Provinsi Banten dan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap kemiskinan.

Landasan Teori

Kemiskinan

Kurangnya sumber daya untuk memastikan kelangsungan hidup, seperti uang dan barang, dapat dipandang sebagai kemiskinan. Menurut Chambers (Suryawati, 2005, p. 1), kemiskinan adalah istilah yang terintegrasi dengan lima aspek, antara lain kemiskinan (poor), ketidakberdayaan, kerentanan dalam menghadapi situasi darurat (state of emergency), ketergantungan, dan isolasi geografis dan sosiologis. Hidup dalam kemiskinan mencakup banyak aspek selain kekurangan uang dan tingkat pendapatan yang rendah, seperti standar kesehatan dan pendidikan yang buruk, perlakuan hukum yang tidak setara, kerentanan terhadap ancaman kriminal, dan kurangnya kendali atas cara hidup sendiri (Suryawati, 2005).

Menurut Sayifullah & Gandasari, 2016 kemiskinan merupakan awal sekaligus akhir dari sebuah siklus kemiskinan di masyarakat. Disebut deprivasi karena menurut definisi BAPPENAS tentang kemiskinan adalah keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang tidak dapat menggunakan hak dasarnya untuk mempertahankan dan memajukan taraf hidup yang terhormat. Hak dasar masyarakat antara lain terpenuhi kebutuhan pangan, papan, air, tanah, dan sumber daya alam lainnya serta lingkungan hidup, rasa aman dari penyalahgunaan atau ancaman kekerasan, dan hak untuk terlibat dalam kegiatan sosial politik bagi laki-laki dan perempuan.

Selain itu, menurut teori lingkaran kemiskinan di dalam (Didu & Fauzi, 2016) lingkaran kemiskinan adalah serangkaian faktor yang saling berhubungan yang saling mempengaruhi dan mengarah pada suatu keadaan dimana suatu negara atau daerah akan terus dimiskinkan dan diperjuangkan untuk memajukan tingkat perkembangannya. Hal ini disebabkan keterbelakangan, kelemahan pasar, dan rendahnya produktivitas pekerja yang disebabkan oleh kurangnya modal. Produktivitas yang rendah juga akan mengakibatkan pendapatan yang buruk, yang akan berdampak pada rendahnya tabungan dan investasi (baik dari sisi investasi modal maupun investasi manusia). Karena keterbelakangan dan faktor lain yang disebabkan oleh investasi yang tidak memadai, skenario ini akan terus ada. Negara miskin adalah negara yang kekurangan akses ke sumber daya, menurut Ragnar Nurkse, yang menyatakan alasan ini pada tahun 1953. "*a poor country is a poor because it is poor*" (negara miskin itu miskin karena dia miskin).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Angkatan kerja menurut (Sukirno, 2004, p. 18) adalah jumlah total tenaga kerja yang ada dalam suatu perekonomian pada saat tertentu. Orang yang bekerja dan orang yang mencari pekerjaan membentuk angkatan kerja. Mereka yang bersekolah, yang mengurus rumah tangga dan kelompok orang lain yang mendapat uang sekarang sudah

tidak bekerja. Penduduk usia kerja yang bekerja atau yang mempunyai pekerjaan tetapi menganggur sementara dan sedang mencari pekerjaan dapat disebut juga sebagai angkatan kerja. Tenaga kerja, sebagaimana didefinisikan oleh Mulyadi, adalah bagian dari tenaga kerja yang secara aktif melakukan atau berusaha melakukan kegiatan produktif, seperti produksi barang dan jasa yang dipekerjakan.

Angkatan kerja adalah sekelompok orang yang berusia di atas 15 tahun yang telah memiliki pekerjaan pada minggu sebelumnya, baik yang sedang bekerja maupun menganggur sementara karena berbagai alasan. Penduduk yang bekerja dan pengangguran merupakan angkatan kerja. Pengangguran adalah individu yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, memilih untuk tidak mencari pekerjaan karena merasa sulit mendapatkan pekerjaan, dan orang yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja pada saat tidak melakukannya. Pengangguran terbuka adalah apa yang dikenal sebagai jenis pengangguran ini.

Penduduk yang terlibat dalam kegiatan ekonomi selama berjam-jam terus menerus selama minggu sebelumnya dengan maksud mendapatkan atau berkontribusi untuk menghasilkan uang atau keuntungan disebut sebagai penduduk "sambil bekerja". Penduduk yang bekerja dibagi menjadi dua kelompok: mereka yang bekerja penuh dan mereka yang setengah menganggur. Penduduk yang bekerja lebih sedikit dari rata-rata dianggap setengah menganggur (kurang dari 35 jam seminggu, tidak termasuk mereka yang sementara tidak bekerja). Indikasi keadaan lapangan kerja yang tersedia adalah persentase angkatan kerja yang dipekerjakan. Ketersediaan pekerjaan memengaruhi produktivitas suatu negara secara keseluruhan, dan tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan salah satu ukuran perubahan lapangan kerja di Indonesia (TPAK). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memberikan ukuran persentase orang yang bekerja atau mencari pekerjaan dan berpartisipasi aktif di pasar tenaga kerja. TPAK dapat dinyatakan untuk jumlah angkatan kerja saat ini atau jumlah pegawai menurut kelompok umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, atau lokasi desa/perkotaan. Rasio jumlah angkatan kerja terhadap seluruh penduduk usia kerja digunakan untuk menghitung TPAK. Besarnya penawaran tenaga kerja relatif (labor supply) yang dapat digunakan dalam penciptaan produk dan jasa dalam suatu perekonomian dapat ditentukan oleh TPAK. Untuk setiap 100 orang usia kerja, TPAK merupakan metrik yang menunjukkan besarnya angkatan kerja.

Upah Minimum

Di pasar tenaga, sangat penting untuk mengidentifikasi jumlah upah yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pembeli. Oleh karena itu, undang-undang upah minimum menetapkan harga kontrak kerja yang harus dibayar (Mankiw, 2006). Laut (Kaufman, 2000), tujuan utama penerapan upah minimum adalah untuk membantu orang mencapai standar hidup dasar mereka, seperti kesehatan, efisiensi, dan rasa kebersamaan. Upah minimal ini dimaksudkan untuk mengurangi gejala depresi masyarakat berpenghasilan rendah, terutama mereka yang bekerja sebagai pengasuh. Mulai sekarang, Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan upah minimum untuk setiap provinsi atau kabupaten di seluruh Indonesia. Dalam hal otonomi daerah, mulai tahun 2001 setiap provinsi menerapkan upah minimum. Standar minimal ini dapat diubah menjadi standar minimal daerah dan standar minimal sektoral.

MetodssSe Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten. Delapan kabupaten/kota di Provinsi Banten menjadi data panel untuk studi empiris ini: Kab. Lebak, Kab. Pandeglang, Kab. Serang, Kab. Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Kami menggunakan data tahunan selama enam tahun (2017-2022). Variabel yang akan digunakan dalam penelitian kami ditunjukkan di bawah ini

Tabel 1. Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Simbol
Variabel Dependent:		
Kemiskinan lnPOV	Jumlah penduduk miskin di provinsi Banten tahun 2017 sampai dengan 2022	Jiwa
Variabel Independent:		
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja TPAK	Persentase banyaknya Angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas.	Persen (%)
Upah Minimum Provinsi MINWAGE	Upah minimum provinsi Banten	Ribu Rupiah

Analisis data penelitian ini menggunakan analisis data panel dengan *Ordinary Least Squares* (OLS). Berikut ini dapat dinyatakan sebagai persamaan model untuk penelitian ini:

Dimana,
 POV = Jumlah Penduduk Miskin
 MINWAGE = Upah Minimum Provinsi
 TPAK = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Untuk menjawab permasalahan penelitian, kami merumuskan hipotesis sebagai berikut:

- (H0). Tidak terdapat pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan secara parsial dan simultan di Provinsi Banten pada tahun 2017-2022.
- (H1). Terdapat pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan secara parsial dan simultan di Provinsi Banten pada tahun 2017-2022.

Hasil Dan Pembahasan

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinieritas

Nilai "VIF (*Variance Inflation Factor*)" dan "Tolerance" digunakan untuk menentukan ada atau tidaknya gejala multikolinieritas. Apakah perbedaan antara nilai "Toleransi" lebih besar dari 1.000 dan nilai "VIF" lebih dari 0,10. Sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi tidak bermasalah dengan multikolinieritas..

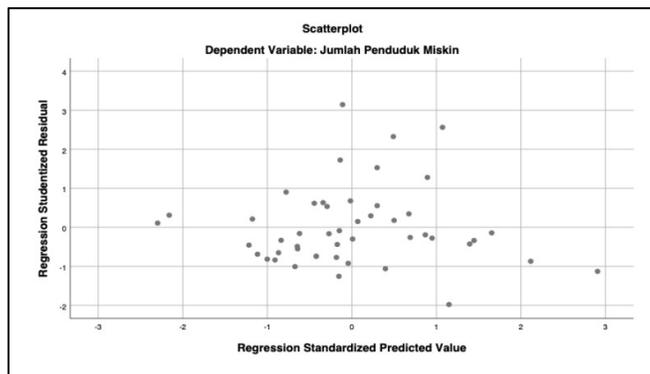
Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas

Dependent Variabel: Jumlah Penduduk Miskin (POV)	Toleranc e	VIF
Upah Minimum Provinsi (UPM)	1.000	1.000
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	1.000	1.000

Hasil pengujian multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai Tolerance dalam penelitian lebih besar 1.000 dan nilai VIF menunjukkan nilai lebih besar dari 0.10. Ini menunjukkan bahwa dalam penelitian tidak terdapat masalah atau terbebas dari multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Cara mengidentifikasi terdapat gejala heterokedastisitas adalah dengan melihat apakah titik-titik membuat pola tertentu atau tidak. Ketika titik-titik tidak membuat pola tertentu dan menyebar maka data terbebas dari heterokedastisitas. Namun ketika titik- titik membuat pola tertentu maka data tersebut terkena heterokedastisitas.



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Hasil pegujian heteroskedastisitas menunjukkan bahwa terjadinya persebaran data dalam penelitian atau dalam scatterplot data tidak membentuk pola tertentu. Kondisi ini berarti bahwa dalam penelitian ini model terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah kesalahan perancu pada periode t dan kesalahan pada periode t-1 berkorelasi dalam model regresi linier (sebelumnya). Nilai Durbin Waston (DW) dapat digunakan untuk menguji autokorelasi; jika nilai DW antara du dan (4 dU) atau du DW (4 dU), maka tidak ada autokorelasi; sebaliknya, jika nilai DW antara dL dan (4 dL), maka terjadi autokorelasi..

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi

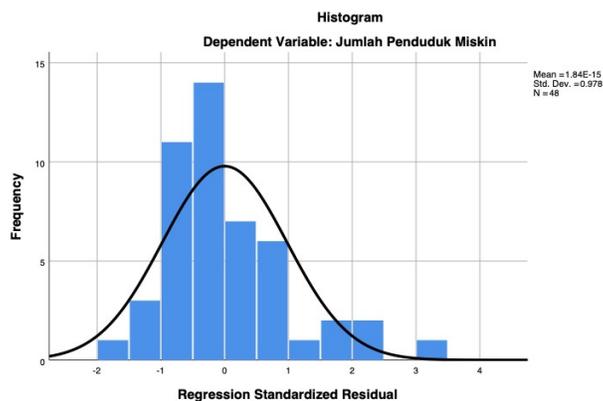
Dependent Variable: Jumlah Penduduk Miskin (POV)	Durbin Watson
Model: 1	2.519
Predictors: (constant), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum Provinsi	

Nilai durbin-watson pada output di atas adalah sebesar 2.519 dengan n sebanyak 47 dan nilai k sebesar 2 maka berdasarkan tabel durbin-watson diketahui bahwa nilai dL yaitu 1.4435 sedangkan nilai dU yaitu 1.6204. Kriteria bebas autokorelasi dalam penelitian adalah $dU (1.6204) \leq dW \leq 4 - dU (1.481)$. Berdasarkan kriteria tersebut maka dapat disimpulkan dalam penelitian terdapat gejala autokorelasi.

Uji Normalitas

Syarat untuk menentukan data tersebut berdistribusi normal atau tidak adalah kita lihat pada kolom /bagian “Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual” ketika titik titik mendekati garis dan tidak memiliki jarak yang jauh dengan garis maka data tersebut berdistribusi Normal, namun ketika titik yang ada menjauhi atau berada jauh dengan garis maka data tidak berdistribusi normal.

Kesimpulan:



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa garis yang ada menunjukkan kekonsistenan dengan melihat sisi bagian kiri dan kanan seimbang, dengan melihat gambar di atas menunjukkan berarti data tersebut bebas uji normalitas. Dilihat bahwa titik mendekati garis dengan arti bahwa data tersebut berdistribusi Normal.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Analisis Regresi Berganda

Tabel 4. Hasil Regresi Linier Berganda

Dependent Variabel: Jumlah Penduduk Miskin	Unstandarize d Coefficients (B)	t	Sig.
(Constant)	591,724	2,582	0,013
Upah Minimum Provinsi (UMP)	1,480E-5	1,151	0,256
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	11,627	3,827	0,002

Persamaan model yang terbentuk dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 Dari model dapat dijelaskan bahwa ketika variabel independen sama dengan nol, maka variabel Kemiskinan sebesar -591,724 jiwa. Ketika variabel Upah Minimum Provinsi (UMP) mengalami peningkatan sebesar satu juta rupiah, maka variabel Kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 0,0000148 jiwa. Selanjutnya, ketika variabel

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mengalami peningkatan sebesar satu persen maka variabel Kemiskinan mengalami peningkatan sebesar 11,627 satuan jiwa.

Uji Parsial (Uji-t)

Kriteria uji hipotesis parsial dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai $t_{statistik} > t_{tabel}$ atau $t_{statistik} < -t_{tabel}$ dengan probabilitas α (0,05) maka H_0 ditolak, konsekuensinya yaitu tidak tolak H_1 , artinya secara parsial *variable* Tingkat Partisipasi Angkatan Kerjadan Upah Minimum Provinsi berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten periode tahun 2017 sampai dengan 2022.
2. Jika nilai $t_{statistik} < t_{tabel}$ atau $-t_{statistik} > -t_{tabel}$ dengan probabilitas α (0,05) maka H_1 ditolak, konsekuensinya yaitu tidak tolak H_0 , artinya secara parsial *variable* Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Upah Minimum Provinsi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten periodetahun 2017 sampai dengan 2022.

Hasil uji parsial dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. HubunganUpah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Kemiskinan (POV)
Nilai $t_{statistik}$ sebesar (1.151) $> t_{tabel}$ (2,014) yang berarti bahwa tidak tolak H_0 , artinya secara parsial *variable* Upah Minimum Provinsi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten periode tahun 2017 sampai dengan 2022.
2. Hubungan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Kemiskinan (POV) Nilai $t_{statistik}$ sebesar (3.287) $> t_{tabel}$ (2,014) yang berarti bahwa tidak tolak H_1 , artinya secara parsial *variable* Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten periodetahun 2017 sampai dengan 2022.S

Uji F

Adapun Kriteria Uji F, sebagai berikut:

1. Jika nilai $F_{statistik} > F_{tabel}$ dengan probabilitas α (0,05), maka H_0 ditolak, konsekuensinya yaitu tidak tolak H_1 , artinya secara simultan *variable* Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Upah Minimum Provinsi berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten periode tahun 2017 sampai dengan 2022.
2. Jika nilai $F_{statistik} < F_{tabel}$ dengan probabilitas α (0,05), maka H_1 ditolak, konsekuensinya yaitu tidak tolak H_0 , artinya secara simultan *variable* Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Upah Minimum Provinsi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten periode tahun 2017 sampai dengan 2022.

Uji F (simultan) menjelaskan pengaruh variabel independent terhadap variabel *dependent* secara bersama-sama. Berdasarkan hasil uji simultan dalam penelitian ini maka diketahui bahwa nilai $F_{statistik}$ (6.110) $> F_{tabel}$ (3,195) H_0 ditolak atau tidak tolak H_1 , artinya secara simultan *variable* Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Upah Minimum Provinsi berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten periode tahun 2017 sampai dengan 2022.

Koefisien Determinasi dan Korelasi

Kriteria uji hipotesis parsial dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bila R^2 mendekati 0, artinya variasi dari Y (Kemiskinan) tidak dapat diterangkan oleh *variable* Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Upah Minimum
2. Bila R^2 mendekati 1, artinya variasi dari Y (Kemiskinan) dapat diterangkan oleh

variable Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Upah Minimum

Tabel 5. Koefisien Determinasi

Dependent Variable: Jumlah Penduduk Miskin	R	R-Square	Adjusted R-Square
Model: 1	0.462	0.214	0.179

Hasil output di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) berasal dari pengkuadratan nilai koefisien korelasi (R) yaitu 0.462^2 . Besaran nilai koefisien determinasi sebesar 0.214 atau sama dengan 21,4% berarti bahwa variabel Upah Minimum Provinsi dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berkontribusi atau menjelaskan variabel Kemiskinan sebesar 21,4% sedangkan sisanya sebesar 78,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Selanjutnya, hasil penelitian ini menggambarkan hubungan yang lemah antara variabel *independent* terhadap variabel *dependent* hal ini karena nilai koefisien korelasi (0.462) yang jauh dari 1.

Kesimpulan

Ketersediaan lapangan kerja merupakan salah satu aspek yang diduga memiliki dampak signifikan dalam penanggulangan kemiskinan. TPAK yang produktif dan berkualitas dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemiskinan dipengaruhi oleh upah minimum di Provinsi Banten dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Pendekatan kuadrat terkecil biasa digunakan untuk melakukan analisis data panel untuk mendukung hipotesis. Temuan uji parsial menunjukkan bahwa sementara tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki dampak yang besar dan positif terhadap kemiskinan di Provinsi Banten, variabel upah minimum provinsi memiliki dampak negatif dan kecil terhadap jumlah penduduk miskin.

Daftar Pustaka

- Desmawan, D., Fadilla, S. N., & Nurmayangsari, R. D. (2022). *Analisis tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di kabupaten pandeglang*. 1(2), 173–178.
- Didu, S., & Fauzi, F. (2016). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lebak. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 6(1), 102–117. <https://doi.org/10.35448/jequ.v6i1.4199>
- Kaufman, B. (2000). *The Economics of Labor Markets* (Fifth Edit). The Dryden Press.
- Mankiw, N. G. (2006). *pengantar teori ekonomi makro* (ketiga). Salemba Empat.
- Sayifullah, S., & Gandasari, T. R. (2016). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 6(2), 236–255. <https://doi.org/10.35448/jequ.v6i2.4345>
- Sukirno, S. (2004). *Makroekonomi: Teori Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada.
- Suryawati, C. (2005). Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. *Jmpk*, 08(03), 121–129.